



## LAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN

---

**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DALAM RANGKA MENDAPATKAN MASUKAN  
TERKAIT PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN)  
KE PT PINDAD (PERSERO)  
DI BANDUNG, JAWA BARAT,  
TANGGAL 20—22 NOVEMBER 2023**

---

### I. PENDAHULUAN

Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/ Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Adapun bentuk-bentuk PMN adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Lebih lanjut, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN dilakukan antara lain dalam rangka; memperbaiki struktur permodalan BUMN; dan/ atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN.

Dari sisi anggaran, dalam Nota Keuangan beserta APBN Tahun 2023 disebutkan total pembiayaan investasi termasuk PMN sebesar Rp 176 Triliun untuk 6 klaster yaitu; infrastruktur, pendidikan, perlindungan masyarakat, pangan dan lingkungan hidup, kerja sama internasional serta klaster lainnya. Adapun pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp 72,4 triliun. Secara umum total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2005-2021 kepada BUMN sebesar Rp 361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun atau total keseluruhan sebesar Rp 695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp 113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp 155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional

(PEN) dan PMN/Investasi lainnya. Sedangkan anggaran PMN tunai pada BUMN Tahun 2020—Semester I Tahun 2022 tercatat sebesar Rp135,36 triliun dengan realisasi Rp131,60 triliun.

Lebih lanjut secara detail, sebagaimana dalam LHP BPK RI Tahun 2021, alokasi APBN pada 5 program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015—2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut yaitu;

- 1) Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun;
- 2) Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun;
- 3) Program Pembangunan Maritim sebesar Rp5,15 triliun;
- 4) Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp2,60 triliun; dan
- 5) Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp4,25 triliun.

Dari sisi audit/pemeriksaan selama 5 tahun terakhir yang terkait dengan pengelolaan PMN pada BUMN, BPK RI melakukan pemeriksaan antara lain:

- 1) Pada Tahun 2023, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Penyertaan Modal Negara di BUMN Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Kementerian BUMN dan instansi terkait. Terdapat 10 temuan hasil pemeriksaan.
- 2) Pada Tahun 2021, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022, Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d. 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Dari LHP tersebut terdapat 70 temuan senilai Rp383,97 miliar dan USD11.88 juta dengan 107 permasalahan dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD11.88 juta.
- 3) Pada Tahun 2019, LHP PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Pindad (Persero), Anak Perusahaan dan Badan Usaha Terkait Tahun Buku 2016, 2017, 2018 dan 2019 (semester I).

Dari sisi gambaran umum perusahaan BUMN yaitu PT Pindad (Persero), merupakan anak usaha PT Len Industri (Persero) yang bergerak di bidang produksi peralatan pertahanan. Pindad merupakan anggota holding BUMN Industri Pertahanan (DEFEND ID). Perusahaan ini memiliki dua pabrik, yakni di Bandung (tempat produksi senjata, kendaraan khusus, dan mesin industrial) dan di Turen (tempat produksi munisi dan bahan peledak komersial). Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini pun memiliki dua kantor perwakilan di Jakarta. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan tertua di Indonesia (menurut keberlanjutan usaha) yang masih tetap berdiri sampai sekarang dan merupakan satu-satunya perusahaan manufaktur pertahanan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perusahaan Perseroan PT Pindad (Persero), PT Pindad memperoleh dana PMN sebesar Rp700 Miliar.

LHP PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Pindad (Persero), Anak Perusahaan dan Badan Usaha Terkait Tahun Buku 2016, 2017, 2018 dan 2019 (semester I) Nomor: LHP PDTT BPK RI Nomor 54/AUDITAMA VII/PDPT/09/2019 tanggal 9 September 2019, ditemukan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Investasi PMN 2015 Terkendala Izin Ekspor dan PT Pindad Menanggung Biaya Pembukaan L/C Sebesar Rp1.142.772.698,00
  - a. PT Pindad memperoleh dana PMN Tahun 2015 . Salah satu program yang diusulkan dalam Kajian PMN 2015 adalah Peningkatan Kapasitas Lini Produksi Munisi Kaliber Kecil. Untuk mendukung kelancaran program tersebut PT Pindad melakukan beberapa kontrak kerjasama pengadaan peralatan produksi dengan Fritz Werner Industrie-Ausruestungen GmbH (FW).
  - b. Salah satu syarat efektifnya kontrak tersebut adalah diterbitkannya ijin ekspor dari negara produsen. Dalam kontrak disebutkan bahwa penjual wajib mengupayakan seluruh perijinan yang diperlukan. Untuk memperoleh ijin ekspor, pihak pembeli dalam hal ini PT Pindad berkewajiban untuk menyediakan End Use Certificate (EUC). Sampai dengan bulan Desember 2018, ijin ekspor belum dapat diperoleh dan PT Pindad mengambil keputusan untuk mengakhiri kontrak.
  - c. PT Pindad juga telah membatalkan L/C yang telah dibuka. Namun L/C tersebut tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak. PT Pindad melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Asia Afrika Bandung sebagai bank penerbit melalui bank penerima telah beberapa kali menyampaikan notifikasi kepada pihak beneficiary, namun belum ada balasan resmi dari pihak beneficiary. LHP Program

yang Didanai PMN Tunai 2015 - 2018 437 4) Sehingga dana PT Pindad senilai L/C yang telah dibuka tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Selain itu PT Pindad juga menanggung biaya pembukaan L/C senilai Rp1.142.772.698,00 dengan rincian terlampir dan potensi adanya masalah hukum dengan FW.

- 2) PT Pindad Belum Menagih Denda Keterlambatan Sebesar Rp584.658.507,35 atas Keterlambatan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Pendukung Gedung Lini Produksi Munisi Kaliber Kecil.
- 3) Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) 2015 Belum Memberikan Manfaat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 120 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perusahaan Perseroan PT Pindad (Persero), PT Pindad memperoleh dana PMN sebesar Rp700 M. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen realisasi pelaksanaan program PMN 2015, diketahui permasalahan sebagai berikut.
  - a. Terdapat program yang batal dilaksanakan
  - b. Proses pengadaan dan implementasi program tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan dalam Kajian Realokasi
- 4) Pelaksanaan Pekerjaan Plat Dinding Geser Tidak Sesuai Spesifikasi yang Diperyaratkan.
- 5) Proses Pengadaan Tiga Kontrak Pekerjaan yang Disubkontrakkan Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp1.664.473.117,48.

Berdasarkan uraian pada bagian ini, BAKN DPR RI perlu melakukan kunjungan lapangan dengan PT Pindad (Persero) terkait dengan gambaran realisasi penggunaan dana PMN, program kerja yang telah dilaksanakan serta rencana kerja ke depannya. Dengan kunjungan kerja lapangan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

## **II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN LAPANGAN**

### **A. Agenda Kegiatan**

Kunjungan lapangan dengan PT Pindad (Persero) terkait dengan gambaran realisasi penggunaan dana PMN, program kerja yang telah dilaksanakan serta rencana kerja ke depannya serta jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT Pindad (Persero) dilaksanakan pada tanggal 20-22 November 2023.

### B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, S.E, M.M	KETUA BAKN DPR RI/F. PD
2.	A-201	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI/ F. PDIP
3.	A-423	Dr. Hj. ANIS BYARWATI	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PKS
4.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-GOLKAR
5.	A-083	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
6.	A-367	SAAN MUSTOPA, M.Si.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.NASDEM
7.	A-018	Drs. H. FATHAN, M.A.P.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PAN
9.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
<b>SEKRETARIAT TIM KUNKER</b>			
10.	--	MARDI HARDJO, S.E., M.Si.	KABAG SET. BAKN
11.	--	DWIAN PUJASWATI	KASUBBAG TU SET. BAKN
12.	--	NURUL ISTIQLAL	STAF SET. BAKN
13.	--	MAFTUCHAH	STAF SET. BAKN
14.	--	DENY HARIYANTO	STAF SET. BAKN
15.	--	FAJAR NURMANSYAH	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	LUSIANA PUTRI AHMADI	TENAGA AHLI BAKN
17.	--	SYAHRONI	TV PARLEMEN
18.	--	FADLUN BARIYAH	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL
19.	--	NABIL EL RASJID	PENGEMUDI

### C. Kegiatan Yang Dilakukan

Kunjungan lapangan ke PT Pindad (Persero) di Bandung, Jawa Barat dihadiri oleh;

- 1) Kemal Sudiro (Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan SDM).
- 2) Hery Mochtady (Vice President Manajemen Risiko & Perencanaan Perusahaan).
- 3) Irena Simarmata (Kepala Satuan Pengawas Internal).
- 4) Dianing Puji Rahayu (Sekretaris Perusahaan).
- 5) Andri Setiyoso (General Manager Alat Berat).
- 6) Yanto Sugiharto (General Manager Senjata).
- 7) Ali Nugraha (Manager Perencanaan Perusahaan).
- 8) Willyz Widhy Wikarya (Expert Bidang Perencanaan Perusahaan).

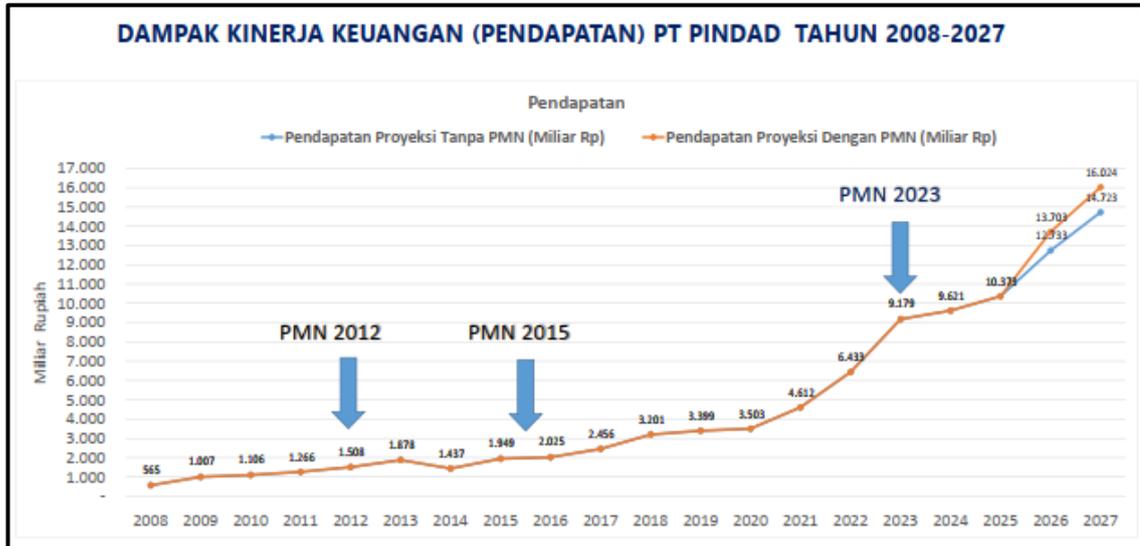
BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan gambaran realisasi penggunaan dana PMN, program kerja yang telah dilaksanakan serta rencana kerja ke depannya serta jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI. Adapun poin-poin penting dalam pertemuan tersebut ialah sebagai berikut.

1. Gambaran umum tentang PT Pindad (Persero). Produk pertahanan berupa senjata, munisi dan kendaraan khusus. Selain itu terdapat produk industrial seperti alat berat, infrastruktur perhubungan dan mining service. Lokasi kantor pusat berada di Bandung dengan luas area 66Ha sedangkan lokasi lainnya ada di Turen (Malang) untuk divisi munisi dengan luas area 166 Ha.
2. Highlight alokasi budget dan realisasi PMN TA 2015 sebesar Rp 700 Miliar sebagaimana diatur dalam PP Nomor 120 Tahun 2015.

**Rp Miliar**

Uraian Program	Alokasi Budget	Realisasi
		Fisik (%)
Pembangunan Lini Produksi Munisi Kaliber Besar	137,60	100%
Pengembangan Lini Produksi Tank & Ranpur	60,00	100%
Peningkatan Kapasitas Lini Produksi Munisi Kaliber Kecil	400,00	100%
Perbaikan Lini Produksi Senjata	51,00	100%
Pengembangan Bisnis Peledak Industrial Mendukung Poros Maritim	33,40	100%
Pengembangan Fasilitas Pengembangan Produk dan Proses	18,00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>700,00</b>	<b>100%</b>

3. Dampak PMN terhadap kinerja keuangan PT Pindad (Persero) tahun 2008—2027 dapat dilihat terdapat kenaikan sebagaimana dalam grafik. Terlampir juga proyeksi pendapatan tanpa PMN dan proyeksi pendapatan dengan PMN untuk tahun 2025 dan setelahnya.



4. Dampak ekonomi-sosial PMN TA 2015 yaitu;

- Pertumbuhan Pendapatan selama tahun 2015-2022 telah memperoleh pendapatan sebesar Rp 27,58 Triliun dengan CAGR 13% dan kontribusi terhadap pendapatan Produk Hankam sebesar 74%.
- Kemandirian dan Peningkatan TKDN Peningkatan TKDN produk rata-rata kini di atas 40% serta mampu mensubstitusi impor kebutuhan Munisi Kaliber Kecil dan Senapan Serbu yang kini dilarang impor kecuali kondisi khusus.
- Penyerapan Tenaga Kerja Implementasi PMN 2012 dan 2015 telah menyerap tenaga kerja sebanyak 420 orang.
- Kontribusi Pajak Total akumulasi kontribusi pajak tahun 2012-2022 mencapai Rp 955,65 Miliar.
- Ekosistem Industri Pertahanan Pendukung Total industri pertahanan pendukung yang terlibat adalah 64 perusahaan dengan 7.135 orang.
- Modernisasi dan Penguasaan Teknologi Tinggi Peningkatan efektifitas produksi terutama di lini produksi munisi melalui modernisasi bertahap, khususnya di lini munisi kaliber kecil. Begitu pula di lini produksi senjata dan kapabilitas produksi Turret di lini Kendaraan Khusus.

5. Kendala/Hambatan yang dihadapi dalam penggunaan dana PMN antara lain; Export Licensed dari negara Jerman yang tidak keluar untuk pengadaan mesin Lini Munisi dan Senjata; Fabrikasi untuk mesin-mesin persenjataan dan munisi di dunia sangat terbatas sehingga perlu lead time yang panjang untuk mendapatkan jadwal produksi; Adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2019 sd 2021 yang mengakibatkan delay-nya produksi mesin-mesin pesanan Pindad akibat diberlakukannya lock down; dan Kendala pengaruh Kurs, karena transaksi kontrak pengadaan mesin PMN dengan fabrikasi luar negeri yang menggunakan mata uang USD dan EURO.

6. Saran terhadap kebijakan PMN, khususnya dukungan penambahan PMN Tunai dan Non Tunai.
  - Mendukung peningkatan kemandirian berdaya saing untuk mendukung pertahanan nasional yang berefek gentar.
  - Jaminan anggaran pertahanan yang kontinu untuk memanfaatkan kapasitas PMN yang sudah terbangun.
  - Berdampak terhadap pengurangan beban impor (substitusi impor) dan peningkatan TKDN komponen produk-produk industri pertahanan untuk diarahkan ke industri hulu pertahanan.
  - Investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan fasilitas MRO produk alat pertahanan dan keamanan.
  - Perusahaan memiliki struktur permodalan yang lebih sehat dari peningkatan ekuitas.
  - Perusahaan memiliki potensi lebih tinggi untuk ekspansi dan membawa dampak ekonomi secara internal maupun eksternal.
7. Arah ekspansi dengan dukungan PMN berkelanjutan, dengan PMN Tunai TA 2023 Rp 417 Miliar, PMN Nontunai TA 2023 Rp 267 Miliar dan selanjutnya Rp 13,3 Triliun, antara lain untuk pengembangan lini produksi munisi kaliber sedang; revitalisasi lini produksi munisi kaliber besar; modernisasi lini produksi senjata; lini spherical powder munisi dan relokasi untuk pengembangan bisnis di Subang.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan kunjungan lapangan ke PT Pindad (Persero) di Bandung, Jawa Barat ialah sebagai berikut.

1. Bagi PT Pindad;
  - a. Sebagai perusahaan BUMN di holding DEFEND.ID/ pertahanan, dampak pemberian PMN yang lalu (TA 2012 dan TA 2015) telah memberikan nilai positif khususnya bagi peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu dampak ekonomi-sosial juga dirasakan besar manfaatnya khususnya dalam hal pertumbuhan pendapatan, kemandirian dan peningkatan TKDN, penyerapan tenaga kerja, kontribusi pajak, ekosistem industri pertahanan serta modernisasi dan penguasaan teknologi tinggi.
  - b. Perusahaan memerlukan PMN TA 2023 dengan proyeksi pendapatan yang akan didapat lebih tinggi dibandingkan tanpa adanya PMN. Ke depannya, perusahaan juga sudah merencanakan alokasi penggunaan PMN untuk ekspansi. PMN ini menjadi sangat penting

karena terkait dengan keamanan dan pertahanan negara. Selain itu perlu adanya modernisasi sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru.

- c. Terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam penggunaan PMN selama ini. Beberapa saran dan kebijakan terkait penambahan PMN juga disampaikan oleh perusahaan dalam agenda ini. Perusahaan perlu membuat peta jalan (roadmap) terkait kebutuhan anggaran di masa yang akan datang.
2. Bagi Pemerintah:
    - a. Dapat mendukung peningkatan kemandirian berdaya saing dalam rangka pengembangan industri pertahanan nasional yang kuat agar tidak bergantung dengan negara lain. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap alokasi PMN bagi perusahaan.
    - b. Memberikan potensi penerimaan negara yang besar dari sisi pajak serta peluang investasi dari luar negeri serta penyerapan tenaga kerja.
    - c. Perlu adanya dukungan penambahan PMN Tunai dan PMN Non Tunai terhadap perusahaan yang memerlukan dana PMN sebagaimana ketentuan yang berlaku.
  3. Bagi Masyarakat: Adanya peluang penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kompetensi SDM.

#### **IV. PENUTUP**

Dari kunjungan kerja lapangan ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari PT Pindad (Persero). Pertemuan itu juga menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan masukan dari PT. Pindad (Persero) atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan PMN.

\*\*\*